

19	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.186,00	2010	Unit Pembibitan Rakyat	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
20	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	8.712,00	2010	Lokasi Pembangunan Sekolah Baru (USB) SMP di Kel. OI FO'O	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
21	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	872,00	2010	<u>Sebidang Tanah</u> <u>Pekarangan</u> <u>LPTQ Kota Bima</u>	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
22	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	2.000,00	2010	PEKARANGAN PUSKESMAS ASAKOTA	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
23	Tanah Sawah	5.460,00	2010	PEMBANGUNAN CADANGAN KANTOR PEMKOT BIMA	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
24	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	564,00	2010	SMPN 14 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
25	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	403,00	2011	Lokasi POSKESDES Kel. Oi Fo'o	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
26	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal lainnya	3.715,00	2011	Sebidang Tanah Untuk Fasilitas Olahraga	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
27	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.300,00	2011	Sebidang Tanah Pekarangan untuk Gedung Kantor DUKCAPIL Kota Bima	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
28	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.000,00	2012	Tanah Bangunan Kantor Lurah Lelamase	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
29	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.300,00	2012	Tanah Bangunan Kantor Lurah Oi Fo'o	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
30	Tanah Bangunan Puskesmas/Poskesdes/Polindes	500,00	13/11/2003	Bangunan PUSKESMAS PEMBANTU LELAMASE	DINAS KESEHATAN
JUMLAH NILAI PEROLEHAN		197.286			

Data Luas Lahan Pemerintah Kota Bima yang bersertifikat

No. Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Penggunaan	SKPD
1	2	5	6	11	SKPD PENGGUNA
1	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.000,00	1972	Tanah Bangunan Gedung Sekolah SDN 40 Lewirato	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.715,00	1974	Tnh Bggn Gedung SDN 41	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	9.350,00	1975	Tanah bangunan Sekolah SDN 18 Kelurahan Dodu	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.339,00	1978	Tanah Bangunan Sekolah SDN 52 Ntobo	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	5.025,00	1978	Tnh Bggn Sekolah SDN 57 Kelurahan Dara	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.616,00	1978	Tanah utk bangunan sekolah SDN 50	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.700,00	1980	Tnh Bggn Diklat (Sekolah) SDN 70	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.638,00	1980	Tanah Bangunan Gedung SDN 08 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	Tanah bangunan pendidikan dan latihan (Sekolah)	1.880,00	1984	Sebidang Tanah Pertanian SDN 73	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.927,00	1994	Tnh Bggn Kantor Pemerintah Kelurahan Dodu	KECAMATAN RASANA E TIMUR
11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	426,00	1994	Sebidang Tanah Pekarangan yang dipergunakan untuk Lapangan Volly	KECAMATAN RASANA E TIMUR
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.191,00	1994	Sebidang Tanah Pekarangan yang dipergunakan untuk Lapangan Volly	KECAMATAN RASANA E TIMUR
13	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.500,00	2001	Tanah Bangunan Gedung SDN 69	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
14	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	600,00	2005	Tanah bangunan Sekolah SDN 77	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
15	Tanah Bangunan Terminal Darat	50.000,00	2006	TERMINAL AKAB	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
16	Tanah Bangunan Mess/ Wisma/ Asrama	50.000,00	2006	ASRAMA BRIMOB PELOPOR IV	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
17	Tanah Bangunan Tempat Kerja lainnya	2.945,00	2009	Sebidang Tanah untuk Kantor LPTQ Kota Bima	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
18	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	4.510,00	2009	Lokasi Pembangunan Puskesmas Penanae	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

311	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	2.652,00	03/08/2017	Pembebasan Lahan Jenamawa - an. H. Syamsudin	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	DAN
312	Tanah Untuk Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggul	829,00	07/09/2017	Penelusuran Sungai Padolo - an. Hew Herawati	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	DAN
313	Tanah Untuk Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggul	785,00	07/09/2017	Pelurusan Sungai Padolo - an. Ang Awar Hidayat	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	DAN
314	Tanah Jalan	518,00	07/09/2017	Pembukaan Jalan Baru - an. M. Sidik	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	DAN
315	Tanah Untuk Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggul	805,00	09/10/2017	Pelurusan Sungai Padolo - an. Turino Wijaya	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	DAN
316	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	349,00	11/10/2017	Taman Fasilitas Umum Kegiatan Masyarakat - an. ZAELANI	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	DAN
317	Tanah Bangunan Gedung	25,00	25/10/2017	Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah - an. YAYUK SRI MAHAYUNISIH	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	DAN
318	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	4.259,00	12/12/2017	Perumahan/Permukiman Korban Banjir - an. Abakar	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	DAN
319	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	9.529,00	12/12/2017	Perumahan/Permukiman Korban Banjir - an. Muhamad	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	DAN
320	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	4.370,00	12/12/2017	Perumahan/Permukiman Untuk Korban Banjir - an. H. Abidin	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	DAN
321	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	6.946,00	12/12/2017	Perumahan/Permukiman Untuk Korban Banjir - an. Usman	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	DAN
322	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	5.752,00	12/12/2017	Perumahan/Permukiman Untuk Korban Banjir - an. Muhammad	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	DAN
323	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	2.580,00	12/12/2017	Perumahan/Permukiman Untuk Korban Banjir - an. Husrin	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	DAN
324	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	2.864,00	12/12/2017	Perumahan/Permukiman Untuk Korban Banjir - an. KALISOM	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	DAN
325	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	1.701,00	12/12/2017	Perumahan/Permukiman Untuk Korban Banjir - an. AISYAH	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	DAN
326	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	3.563,00	12/12/2017	Perumahan/Permukiman Untuk Korban Banjir - an. Ismail	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	DAN
327	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	1.341,00	13/12/2017	Perumahan/Permukiman Untuk Korban Banjir - an. Amiruddin	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	DAN
328	Tanah Untuk Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggul	827,00	29/12/2017	Jembatan Kodo I	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	DAN
329	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	10.235,00	29/12/2017	Relokasi Korban Banjir - an. MOH. NOR	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	DAN
330	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	422,00	29/12/2017	Relokasi Korban Banjir - an. SULAIMAN	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	DAN
331	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.463,00	1995	SDN 02 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN	DAN
332	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.183,00	1996	SDN 51 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN	DAN
333	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.132,00	1997/1995	SDN 49 KOTA BIMA/SDN 11 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN	DAN
334	Tanah Kosong yang sudah diperuntukkan	29.678,00		RELOKASI KORBAN BANJIR	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BIMA	DAN
	JUMLAH NILAI PEROLEHAN	1.127.875,23				

284	Tanah yang sudah tererosi/Longsor	5.200,00	28/06/2006	Relokasi Bencana Banjir di Jatibaru	KECAMATAN ASAKOTA
285	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2.500,00	28/06/2006	Lokasi Kuburan Jatibaru	KECAMATAN ASAKOTA
286	Tanah Untuk Monumen	1.500,00	31/12/2006	Lokasi Tugu Pancasila Amahami	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
287	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.800,00	31/12/2006	Tnh Bgn Kantor Pemerintahan	KECAMATAN RABA
288	Tanah Bangunan Balai Sidang/ Pertemuan	378,00	31/12/2007	Tanah LBK Lokasi Bina Karya	DINAS SOSIAL
289	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal lainnya		26/02/2014	Timbunan dan Drainase	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
290	Tanah Untuk Air Irigasi		26/02/2014	Perencanaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
291	Tanah Bangunan Terminal Darat	250,00	26/03/2014	Belanja Pengadaan Tanah Urugan Terminal AKAP Amahami	DINAS PERHUBUNGAN
292	Tanah Lapangan Sepak Bola	1.900,00	09/06/2014	Timbunan dan Drainase	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
293	Tanah Lahan Pasar	3.240,00	03/10/2014	Timbunan dan Drainase	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
294	Tanah Lapangan Sepak Bola	30.000,00	30/04/2015	Tanah Urugan Lapangan Sepak Bola Kel. Ntobo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
295	Tanah Untuk Tugu Batas Wilayah	900,00	25/06/2015	Tanah Urugan Penataan Perbatasan Niu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
296	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	874,00	04/08/2016	Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota (An. Akmal)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
297	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,00	03/11/2016	Timbunan Tanah Halaman Kantor	BAGIAN UMUM
298	Tanah Lapangan Olah Raga Lain-lain	1.313,00	30/12/2016	Lapangan Olah raga	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
299	Tanah Untuk Jalan Propinsi	64,00	30/12/2016	Pelebaran Jalan	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
300	Tanah Jembatan	66,00	30/12/2016	Tanah Fasilitas Umum	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
301	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	354,00	30/12/2016	Pembangunan PUSTU Oifo,o	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
302	Tanah Lapangan Olah Raga Lain-lain	8.617,00	30/12/2016	Lapangan Olah Raga	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
303	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,00	30/12/2016	Cadangan Pembangunan Gedung Kantor Penatoi	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
304	Makam Umum/Kuburan Umum	2.940,00	30/12/2016	Kuburan Umum di Kelurahan Jatiwangi	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
305	Tanah Untuk Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggul	3.222,00	03/08/2017	Pelurusan Sungai Padolo - an. Anwar	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
306	Tanah Untuk Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggul	311,00	03/08/2017	Pelurusan Sungai Padolo - AN. Syaiful Arifin	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
307	Tanah Untuk Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggul	1.460,00	03/08/2017	Pelurusan Sungai Padolo - an. Syaiful Arifin	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
308	Tanah Untuk Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggul	585,00	03/08/2017	Pelurusan Sungai Padolo - an. Nazaruddin	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
309	Tanah Untuk Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggul	1.139,00	03/08/2017	Pelurusan Sungai Padolo - an. Abdullah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
310	Tanah Untuk Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggul	2.354,00	03/08/2017	Pelurusan Sungai Padolo - an. A. Hamid	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

258	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	400,00	31/12/1995	Tanah Bangunan X Kantor Kel. Jatiwangi skrng di bangunan Kantor KUA	KECAMATAN ASAKOTA
259	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	5.688,00	31/12/1995	Tanah Bangunan SDN 24 Kota Bima	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
260	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	6.207,00	28/08/1996	Sebidang Tanah untuk SDN Lampe	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
261	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	400,00	31/12/1996	Tnh Untuk Bgmn Gedung (Penggunaan Pasar Kolo)	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN PERDAGANGAN
262	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2.895,00	31/12/1996	SDN 26 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
263	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.593,00	31/12/1996	SDN 35 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
264	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	14.213,00	31/12/1999	Tanah untuk Bangunan dan Latihan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
265	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	30.000,00	31/12/1999	Tanah Bangunan Pendidikan SMPN 10 Kota Bima	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
266	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	18.473,00	31/12/2000	SMP N 07	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
267	Tanah Bangunan Pasar	800,00	31/12/2002	Tanah Untuk Pasar Jatibaru	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN PERDAGANGAN
268	Tanah Bangunan Pasar	1.192,00	31/12/2002	Tanah Untuk Pasar Rabangodu	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN PERDAGANGAN
269	Tanah Bangunan Pasar	1.595,00	31/12/2002	Tanah Untuk Pasar Kumbe	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN PERDAGANGAN
270	Tanah Bangunan Pasar	3.500,00	31/12/2002	Tanah Untuk Pasar Penaraga	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN PERDAGANGAN
271	Tanah Bangunan Pasar	9.000,00	31/12/2002	Tanah Untuk Pasar Raya Bima	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN PERDAGANGAN
272	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	471,00	31/12/2002	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KECAMATAN RABA
273	Tanah Bangunan Sarana Olah Raga Terbuka	9.900,00	13/11/2003	Tnh Lapangan Sepak Bola	KECAMATAN RASANA E TIMUR
274	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.000,00	13/11/2003	Tnh Bgmn Kantor Pemerintah	KECAMATAN RASANA E TIMUR
275	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	600,00	13/11/2003	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KECAMATAN ASAKOTA
276	Tanah Bangunan Puskesmas/Poskesdes/Polindes	300,00	13/11/2003	Bangunan POSKESDES KUMBE	DINAS KESEHATAN
277	Tanah Bangunan Puskesmas/Poskesdes/Polindes	350,00	13/11/2003	Bangunan POLINDES SARAE	DINAS KESEHATAN
278	Tanah Bangunan Puskesmas/Poskesdes/Polindes	622,30	13/11/2003	Bangunan PUSKESMAS PEMBANTU JATIBARU	DINAS KESEHATAN
279	Tanah Bangunan Puskesmas/Poskesdes/Polindes	820,80	13/11/2003	Bangunan POLINDES KOLO	DINAS KESEHATAN
280	Tanah Bangunan Puskesmas/Poskesdes/Polindes	500,00	13/11/2003	Bangunan PUSKESMAS PEMBANTU NITU	DINAS KESEHATAN
281	Tanah Bangunan Puskesmas/Poskesdes/Polindes	500,00	13/11/2003	Bangunan PUSKESMAS PEMBANTU LELAMASE	DINAS KESEHATAN
282	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	217,50	13/11/2003	Tanah Bangunan Gedung KANTOR DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
283	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1.025,00	26/05/2005	Lokasi Puskesmas Dara/Paruga a.n. Halim Perdana Kusuma	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

233	Tanah Wisata/ Rekreasi	Bangunan Taman/	7.150,00	2013	Lokasi Pondok Wisata Kel. Kolo	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
234	Tanah Pemerintah	Bangunan Kantor	1.500,00	2013	Pemb PKM Pembantu di Kel. Matakando	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
235	Tanah Pemerintah	Bangunan Kantor	2.471,00	2013	Lokasi Demplot Pertanian Kel. Penaraga	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
236	Tanah Darat	Bangunan Terminal	1.324,80	2013	Penimbunan Lokasi Gudang Bongkar Pasang Barang	DINAS PERHUBUNGAN	
237	Tanah Jalan		2.231,00	2014	Tanah Untuk Fasilitas Umum Pelebaran Jalan Lawata Ni,u Keterangan Kepemilikan Nomor 474.1/183/V/2014	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
238	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan		4.088,00	2014	Tanah Untuk Fasilitas Umum di Kelurahan Penatoi	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
239	Tanah Lainnya	Bangunan Tempat Kerja	250,00	2014	Tanah Untuk Fasilitas Umum di Kelurahan Kumbe	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
240	Tanah Jalan		888,00	2014	Tanah Kantor Untuk Jalan Masuk Kantor Kecamatan Asakota	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
241	Tanah Pemerintah	Bangunan Kantor	1.000,00	2014	Tanah Kantor Untuk Lokasi Pembangunan Kantor Kelurahan Rite	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
242	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan		1.079,00	2014	Tanah Fasilitas Umum di Kelurahan Paruga	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
243	Tanah Jalan		2.087,70	2015	Pelebaran Jalan Padolo III di Kelurahan Dara	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
244	Tanah Pekuburan Kristen		18.223,00	2015	Pekuburan Kristen di Kelurahan Kendo	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
245	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan		1.783,00	2015	Tanah Untuk Fasilitas Umum di Kelurahan Dara (2 Objek)	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
246	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan		5.810,00	2015	Tanah Untuk Fasilitas Umum a.n. . Tayeb	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
247	Tanah Jembatan Lain-lain	Bangunan Jln dan	100,00	2015	Tanah untuk pembangunan Gapura a.n Drs. H. Ibrahim H. Ismail	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
248	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan		208,00	2015	Tanah Untuk Fasilitas Umum a.n. Ilham	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
249	Tanah Instalasi Air Bersih/Air Baku	Untuk Bangunan	3.000,00	2015	Bak Penampungan Air Bersih di Kelurahan Dodu	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
250	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan		312,00	2015	Tanah Untuk Fasilitas Umum a.n. Yaman	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
251	Tanah Pemerintah	Bangunan Kantor	1.188,00	2015	Tanah Gedung Kantor Kelurahan Paruga a.n. Mulyono TAN	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
252	Tanah dan Latihan (Sekolah)	Bangunan Pendidikan	14.689,00	31/12/1954	Tanah bangunan pendidikan dan latihan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DAN
253	Tanah dan Latihan (Sekolah)	Bangunan Pendidikan	9.152,00	31/12/1976	Tanah utk bangunan sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DAN
254	Tanah Pemerintah	Bangunan Kantor	425,00	31/12/1977	Tnh Bgmn Balai Sidang/pertemuan	KECAMATAN MPUNDA	
255	Tanah dan Latihan (Sekolah)	Bangunan Pendidikan	9.240,00	31/12/1978	Tanah unt Bgmn Diklat	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DAN
256	Tanah Pemerintah	Bangunan Kantor	500,00	31/12/1986	Tnh Bgmn Kantor Pemerintah	DINAS SOSIAL	
257	Tanah dan Latihan (Sekolah)	Bangunan Pendidikan	22.197,00	31/12/1989	Tanah Gedung Sekolah SMPN 08 dan SPG Negeri Bima	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DAN

207	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	8.712,00	2010	Lokasi Pembangunan Sekoah Baru (USB) SMP di Kel. Oi FO'O	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
208	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	872,00	2010	Sebidang Tanah Pekarangan LPTQ Kota Bima	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
209	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	804,00	2010	PEMBANGUNAN POSKESDES KEL.PENATOI	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
210	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	2.000,00	2010	PEKARANGAN PUSKESMAS ASAKOTA	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
211	Tanah Sawah	5.460,00	2010	PEMBANGUNAN CADANGAN KANTOR PEMKOT BIMA	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
212	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	564,00	2010	SMPN 14 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
213	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	500,00	2011	Tanah Kantor Kel. Pane	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
214	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	403,00	2011	Lokasi POSKESDES Kel. Oi Fo'o	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
215	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal lainnya	3.715,00	2011	Sebidang Tanah Untuk Fasilitas Olahraga	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
216	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.300,00	2011	Sebidang Tanah untuk Gedung Kantor DUKCAPIL Kota Bima	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
217	Tanah Jalan	5.501,09	2012	Pelebaran Jalan Padolo III	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
218	Tanah Lapangan Bola Volly	372,00	2012	Tanah Lapangan SDN 53	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
219	Tanah Makam Umum/ Kuburan Umum	143,00	2012	Perluasan Kuburan Mande	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
220	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.000,00	2012	Tanah Bangunan Kantor Lurah Lelamase	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
221	Tanah Bangunan Taman/ Wisata/ Rekreasi	2.640,00	2012	Tanah Taman Amahami	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
222	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.300,00	2012	Tanah Bangunan Kantor Lurah Oi Fo'o	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
223	Tanah Jalan	2.500,00	2012	Jalan Lawata-Oi Ni'U (n. H. Abdarab Maudah)	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
224	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.000,00	2012	Tanah Bangunan Kantor Lurah Monggonao	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
225	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.600,00	2012	Tanah Bangunan Kantor Lurah Matakando	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
226	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.590,00	2013	Perluasan Hlmn Ktr. Lrh Rabadompu Timur	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
227	Tanah Makam Umum/ Kuburan Umum	1.192,00	2013	Perluasan Kuburan Lewirato	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
228	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.193,00	2013	Lokasi Pemb. Polsek Asakota Kel. Jatiwangi (3 Objek)	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
229	Tanah Jalan	136,00	2013	Jln Masuk Lokasi Pembibitan Ikan Dodu	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
230	Tanah Kampung	1.033,00	2013	Fasilitas Umum Kel. Ntobo	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
231	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.000,00	2013	Instalasi Pengolahan Air Bersih Pemkot Bima	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
232	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.600,00	2013	Perluasan RPH Kel. Jatiwangi	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI

180	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	800,00	2008	Kantor Kel.Nae	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
181	Tanah Jalan	402,00	2008	Pelebaran Jl.Lingkungan Kel.Rabangodu Selatan	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
182	Tanah Jaringan/ Saluran	664,00	2008	Pelebaran Jalan Kel.Monggonao	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
183	Tanah Sawah	40,00	2008	Kuburan Umum Songgela	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
184	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	600,00	2008	Jalan Masuk Kantor Camat asakota	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
185	Tanah Tegalan	7.878,00	2008	Perluasan Kuburan Bonto	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
186	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.769,00	2008	Lokasi Kantor Camat Rasanae Timur	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
187	Tanah Bangunan Sarana Olah Raga Terbuka	165,00	2008	LAPANGAN OLAHRAGA	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
188	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.056,00	2008	Tanah bangunan Kantor BPP Pertanian RasanaE Timur	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
189	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	4.235,00	2008	Tanah Bangunan SMPN 13 Kota Bima	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
190	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.500,00	2009	Kantor BPP Rasana'E Timur	DINAS PERTANIAN
191	Tanah Bangunan Balai Sidang/ Pertemuan	3.702,41	2009	Tanah Bangunan Gedung Paruga NaE	BAGIAN UMUM
192	Tanah Jalan	810,69	2009	Pelebaran Jalan Jatiwangi a.n. Alm. Abubakar Bin Hasan	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
193	Tanah Jalan	400,00	2009	Lokasi Jalan Masuk Rumah Potong Hewan (RPH)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
194	Tanah Bangunan Tempat Kerja lainnya	300,00	2009	Sekretariat HMI Cabang Bima a.n. Abdul Malik	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
195	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	564,00	2009	Lokasi Perluasan SMPN 14 Kota Bima	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
196	Tanah Makam Umum/ Kuburan Umum	5.235,00	2009	Perluasan Kuburan Matakando	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
197	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.466,00	2009	Lokasi Pembangunan Kantor Lurah Mandé	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
198	Tanah Bangunan Tempat Kerja lainnya	2.945,00	2009	Sebidang Tanah untuk Kantor LPTQ Kota Bima	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
199	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	4.510,00	2009	Lokasi Pembangunan Puskesmas Penanae	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
200	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	100,00	2009	Poskesdes Sadia	DINAS KESEHATAN
201	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	250,00	2009	Poskesdes Monggonao	DINAS KESEHATAN
202	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	400,00	2009	Bangunan Pustu Mandé	DINAS KESEHATAN
203	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	250,00	2009	Poskesdes Penatoi	DINAS KESEHATAN
204	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	400,00	2009	Poskesdes Panggi	DINAS KESEHATAN
205	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.949,00	2010	KUBURAN MONGGONAO a.n. Hj. Jubaidah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
206	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.186,00	2010	Unit Pembibitan Rakyat	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

156	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	80,00	2007	Lokasi SDLB Pane Nae (Tali Asih)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
157	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Air Bersih/ Air Baku	7.000,00	2007	Lokasi PDAM Wadu Mbolo (Muh. Saleh Abdullah)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
158	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	33.861,00	2007	Lokasi Pemb. Kantor Walikota Bima a.n. Ir. H. RIFAI A. WAHAB	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
159	Tanah Makam Umum/ Kuburan Umum	5.000,00	2007	Lokasi Kuburan Kumbe a.n. ABUL HAMID M. SALEH	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
160	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.453,00	2007	Pembebasan Tanah Lokasi Kantor Lurah Santi a.n. A. WAHAB YASIN	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
161	Tanah Jalan	1.500,00	2007	Taliasih Perluasan Pelebaran Jalan Sadia-Bedi	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
162	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	800,00	2007	Cadangan Pemb. Prasarana Kec. Pemekaran Kel. Paruga (Indra Gunawan)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
163	Tanah Bangunan Taman/ Wisata/ Rekreasi	1.400,00	2007	Lokasi Areal Taman Ama Hami a.n. H. M. Rum Azhari	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
164	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.635,00	2007	Perluasan Lokasi SMP 1 Kota Bima Lewirato Penatoi	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
165	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.787,00	2007	KANTOR P4S (Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
166	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.835,00	2007	Lokasi Cadangan Pembangunan Kantor Kelurahan Penaraga (yang disertifikat 1.835m2) sisa UPT. KB dan KUA Raba	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
167	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5.900,00	2007	Cadangan Pemb. Lokasi Depan lawata (Hafni H.M. Hasan)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
168	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.478,00	2007	Lokasi Kantor KPPT Nae (H. Djafar H. Hasan)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
169	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.477,00	2007	KANTOR CAMAT ASAKOTA	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
170	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2.000,00	2007	Cadangan Pemb. Prasarana Kec. Pemekaran Kec. Mpunda (Indra Gunawan)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
171	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.050,00	2007	KANTOR CAMAT MPUNDA	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
172	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5.700,00	2007	Tanah bangunan Kantor BKP2 dan KOMINFO	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
173	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	200,00	2007	Poskesdes Santi	DINAS KESEHATAN
174	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	250,00	2007	Poskesdes Manggemaci	DINAS KESEHATAN
175	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	400,00	2007	Bangunan Pustu Pangi	DINAS KESEHATAN
176	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.714,00	2007	Tanah Tanah Kosong (kebun) untuk SMPN 1 Kota Bima	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
177	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1.876,00	2008	Lokasi Kantor Kel.Pangi a.n. Surya Purnama a.n. Ahmad, S.Sos.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
178	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	6.269,00	2008	PKM Perawatan Rasanae Timur a.n : Drs. Lukman HAM (6 Objek)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
179	Tanah Sawah	590,00	2008	Jalan Masuk Kantor Camat Mpunda	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

130	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.550,00	2004	Kantor Instalasi Farmasi Kota Bima (IFK) Dikes	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
131	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	2,00	2004	POSKESEDES PenanaE	DINAS KESEHATAN
132	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1,00	2004	Pembebasan Tanah PKM Paruga	DINAS KESEHATAN
133	Tanah Kebun	13.537,80	2004	Tanah Kebun	DINAS PERTANIAN
134	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	600,00	2005	Tanah bangunan Sekolah SDN 77	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
135	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.000,00	2006	Kantor BKPP	DINAS KETAHANAN PANGAN
136	Tanah Jalan	400,00	2006	Tambahan Perluasan Jalan Rabanggodu - Mande	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
137	Tanah Bangunan Sarana Olah Raga Terbuka	15.000,00	2006	Pemanfaatan Lahan Dishut Prov. NTB (Lapangan Olahraga Penaraga)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
138	Tanah Jalan	700,00	2006	Lokasi Pembukaan jalan Baru Di Karara-Santi (a.n. M. Yamin)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
139	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	2.200,00	2006	Perluasan Daerah Aliran Dam Sangga-Kendo (Siti Hajar Usman, dkk)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
140	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.000,00	2006	Lokasi Kantor KPUD Kota Bima	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
141	Tanah Untuk Jalan Khusus/ Komplek	4.700,00	2006	Lokasi Pengerasan Pintu Asrama Brimob	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
142	Tanah Untuk Jalan Desa	5.471,00	2006	Perluasan Jalan Rabanggodu-Mande (H. Abdurrahman Saleh, dkk 28 Org)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
143	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.000,00	2006	Lokasi Kantor BPP Pertanian Asakota a.n : Syaiful	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
144	Tanah Bangunan Kandang Hewan	4.400,00	2006	Kantor BPP Pertanian & Poskeswan Kel. Lampe	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
145	Tanah Untuk Jalan Propinsi	14.400,00	2006	Pelebaran Jalan Melayu Kolo Tahap I	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
146	Tanah Bangunan Taman/ Wisata/ Rekreasi	4.860,00	2006	Lokasi Taman Amahami dan Tugu Pancasila a.n. H. M. Rum Azhari	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
147	Tanah Bangunan Terminal Darat	50.000,00	2006	TERMINAL AKAB	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
148	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7.600,00	2006	Kantor PLUT Kota Bima	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
149	Tanah Bangunan Mess/ Wisma/ Asrama	50.000,00	2006	ASRAMA BRIMOB PELOPOR IV	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
150	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.000,00	2006	Ganti Rugi Ex Perluasan Desa Nungga	KECAMATAN RASANA E TIMUR
151	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6.260,00	2006	Ganti Rugi Ex. Demplot Nungga	KECAMATAN RASANA E TIMUR
152	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.800,00	2006	Tnh Bgn Kantor Pemerintahan	KECAMATAN RABA
153	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	967,92	2006	Tnh Bgmn Kantor Pemerintah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
154	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2.621,70	2007	Halaman Kantor	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
155	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	200,00	2007	Perluasan Lokasi SD Wenggo	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

103	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.132,00	1997	Tanah Bangunan Gedung SDN 11 Raba	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
104	Tanah Kosong Yang Tidak Diusahakan	1.200,00	2000	Tnh Kas Desa	KECAMATAN RABA
105	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.500,00	2001	Tanah Bangunan Gedung SDN 69	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
106	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.500,00	2002	Tanah Bangunan Kantor	DINAS PERTANIAN
107	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7.200,00	2002	Tanah Bangunan Kantor Kel. Nungga	KECAMATAN RASANA E TIMUR
108	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.030,00	2002	KANTOR CAMAT RABA	KECAMATAN RABA
109	Tanah Bangunan Terminal Darat	2.700,00	2002	Areal Parkir Terminal Dara	DINAS PERHUBUNGAN
110	Tanah Bangunan Terminal Darat	2.200,00	2002	Areal Parkir Terminal Dara	DINAS PERHUBUNGAN
111	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	210,00	2002	Bangunan Pustu Nungga	DINAS KESEHATAN
112	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	540,00	2002	Bangunan Pustu Sambinae	DINAS KESEHATAN
113	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6.136,10	2003	Tanah Bangunan Eks DPRD Kab. Bima	SEKRETARIAT DPRD
114	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.961,43	2003	KANTOR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
115	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	800,00	2003	Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
116	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.006,76	2003	Tanah Bangunan Gedung Kamar Bola	BAGIAN UMUM
117	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	780,42	2003	Tanah Bangunan Kantor Walikota Bima	BAGIAN UMUM
118	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	738,00	2003	Pembangunan Kantor Pemerintah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
119	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	119,85	2003	Tnh Bgmn Kantor Pemerintah	KECAMATAN RASANA E BARAT
120	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.000,00	2003	Tanah Bangunan Posyandu Lewirato	KECAMATAN MPUNDA
121	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	600,00	2003	Tnh Bgmn Kantor Pemerintah	KECAMATAN RABA
122	Tanah Bangunan Terminal Darat	3.197,00	2003	Tanah bangunan Terminal Jatibaru	DINAS PERHUBUNGAN
123	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	688,50	2003	Tanah untuk bangunan Polindes Penaraga	DINAS KESEHATAN
124	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	450,00	2003	Tanah Perumahan SDN 20 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
125	Tanah Bangunan Industri Makanan	2.000,00	2004	Tanah Pembangunan Pabrik ES	BAGIAN UMUM
126	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5.000,00	2004	Tanah Gedung Islamic Centre	BAGIAN UMUM
127	Tanah Kebun	13.537,80	2004	Tanah Kebun	BAGIAN UMUM
128	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.030,00	2004	Tanah utk Kec. Rasana E Timur	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
129	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.800,00	2004	Pembebasan tanah eks Depag Kota Bima	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

77	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.796,00	1995	SDN 44 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
78	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2.080,00	1995	SDN 10 MENJADI SDN 27 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
79	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.850,00	1995	SDN 06 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
80	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.040,00	1995	SDN 27 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
81	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	6.670,00	1995	SDN 07 RABA / SDN 14 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
82	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.315,00	1995	SDN 01 KOTA BIMA/SD INPRES BENTENG	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
83	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.228,00	1995	SDN 01 KOTA BIMA/SD INPRES BENTENG	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
84	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	756,00	1996	SEBIDANG TANAH KOSONG EX KANTOR KELURAHAN	KECAMATAN RASANA E BARAT
85	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	130,00	1996	Tnh Bgmn Tempat Kerja Lainnya	KECAMATAN MPUNDA
86	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.802,00	1996	SDN 68 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
87	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	571,00	1996	SDN Inpres Pane menjadi SDN 17 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
88	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.590,00	1996	SDN 32 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
89	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.850,00	1996	SDN 10 Menjadi SDN 29 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
90	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.623,00	1996	SDN 11 KOTA BIMA/SDN 05 BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
91	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.157,00	1996	GEDUNG SEKOLAH SDN 34 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
92	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.234,00	1996	SDN 25 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
93	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	8.148,00	1996	Tanah Bangunan SDN 22 gabung dengan SMPN 11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
94	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	4.068,00	1996	SDN 55 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
95	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.286,00	1996	BANGUNAN SEKOLAH	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
96	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	3.254,00	1996	SDN 72 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
97	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	6.120,00	1996	SDN 30 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
98	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.850,00	1996	SDN.29 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
99	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.331,00	1996	SDN 37 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
100	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.960,00	1996	BANGUNAN SEKOLAH	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
101	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	775,00	1997	Tnh Bgmn Kantor Pemerintah	KECAMATAN RABA
102	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	4.557,00	1997	Tanah bangunan Gedung SDN Inpres Kuta	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

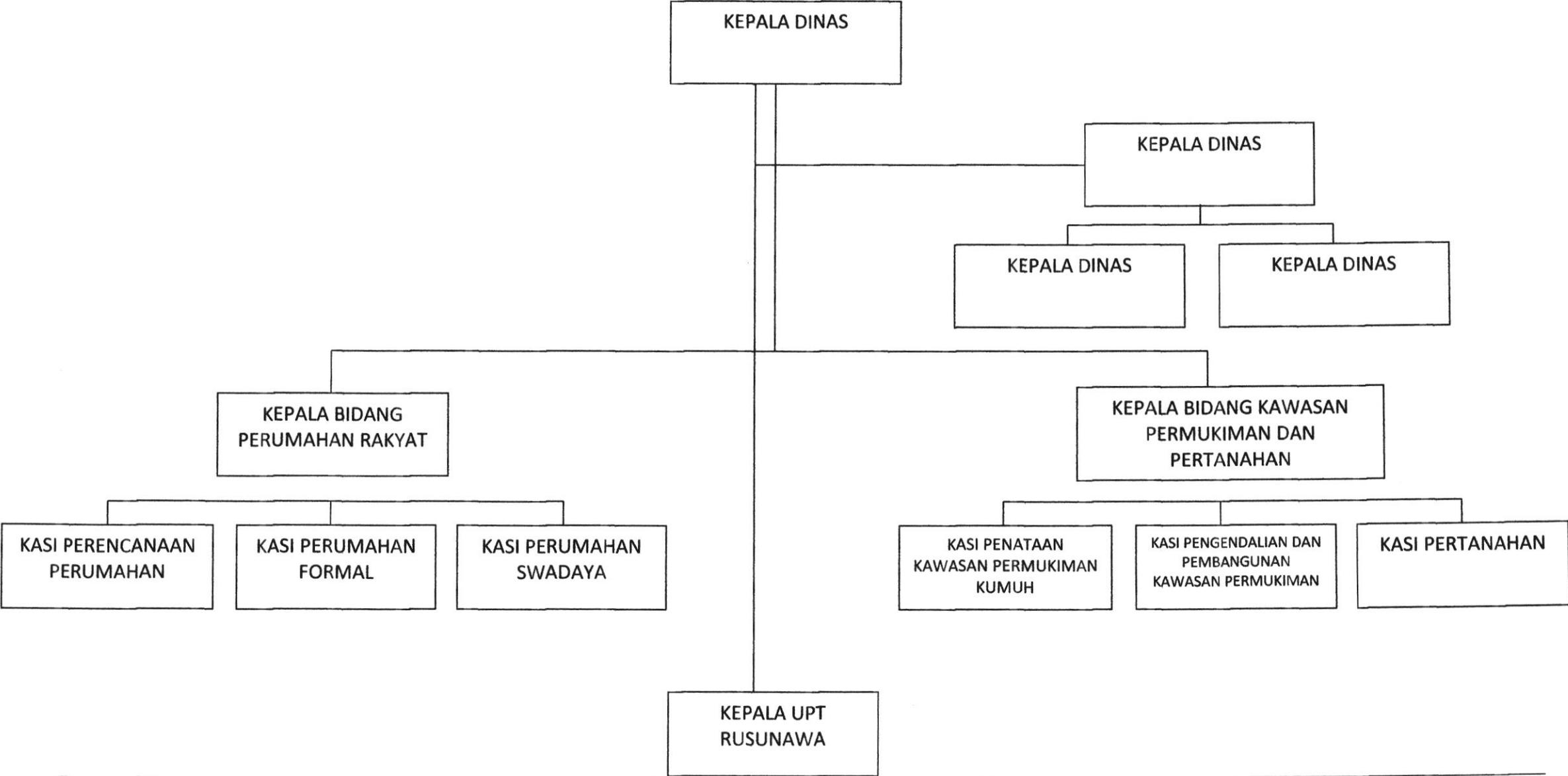
51	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	200,00	1989	Tanah Perumahan Paramedis	DINAS KESEHATAN
52	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	400,00	1989	Tanah Perumahan Dokter	DINAS KESEHATAN
53	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	405,00	1989	Tanah Gedung KIA	DINAS KESEHATAN
54	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	500,00	1989	Tanah Perumahan Dokter Gigi	DINAS KESEHATAN
55	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	569,25	1989	Tanah Gedung Poli Umum	DINAS KESEHATAN
56	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	7.120,00	1991	SMP 3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
57	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	388,80	1993	Tnh Bgmn Kantor Pemerintah	KECAMATAN ASAKOTA
58	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	495,00	1993	Bangunan Pustu Dodu	DINAS KESEHATAN
59	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.927,00	1994	Tnh Bgmn Kantor Pemerintah Kelurahan Dodu	KECAMATAN RASANA E TIMUR
60	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	426,00	1994	Sebidang Tanah Pekarangan dipergunakan Lapangan Volly	KECAMATAN RASANA E TIMUR
61	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.191,00	1994	Sebidang Tanah Pekarangan dipergunakan Lapangan Volly	KECAMATAN RASANA E TIMUR
62	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	909,00	1994	Tnh Bgmn Kantor Pemerintah	KECAMATAN MPUNDA
63	Tanah Bangunan Pendidikan dan latihan (sekolah)	1.500,00	1994	Tanah Bangunan Sekolah SMPN 04	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
64	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	3.614,00	1994	Sebidang Tanah untuk Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
65	Tanah Bangunan Pendidikan dan latihan (sekolah)	4.372,00	1994	Tanah untuk bangunan pendidikan dan latihan Bagian Utara	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
66	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	368,30	1995	Tnh Bgmn Kantor Pemerintah	KECAMATAN RABA
67	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.271,00	1995	SDN 60 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
68	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.280,00	1995	Tanah Bangunan sekolah SDN 71	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
69	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.598,00	1995	SDN 12 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
70	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.038,00	1995	SDN 21 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
71	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.040,00	1995	SDN 10 RABA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
72	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.618,00	1995	GEDUNG SEKOLAH	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
73	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.208,00	1995	SDN 19 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
74	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	4.100,00	1995	SDN 20 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
75	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.460,00	1995	SDN 54 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
76	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.536,00	1995	SDN 16 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

24	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.623,00	1977	Tanah utk bangunan sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
25	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	300,00	1978	POSKEDES LELAMASE	DINAS KESEHATAN
26	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.339,00	1978	Tanah Bangunan Sekolah SDN 52 Ntobo	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
27	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	5.025,00	1978	Tnh Bgmn Sekolah SDN 57 Kelurahan Dara	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
28	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.616,00	1978	Tanah utk bangunan sekolah SDN 50	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
29	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.777,00	1978	Tanah Pekarangan Pemb.gedung SDN 59	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
30	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	7.413,00	1978	Tnh Bgmn Diklat (Sekolah)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
31	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	4.574,00	1979	Kebun dan lapangan olahraga/UP SDN 62	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
32	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.000,00	1980	Rumah Dinas Jabatan Camat	KECAMATAN MPUNDA
33	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.500,00	1980	Tanah utk bangunan sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
34	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.000,00	1980	Tnh Bgmn Diklat (Sekolah)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
35	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	746,00	1980	HALAMAN SEKOLAH BANGUNAN SEKOLAH	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
36	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	408,00	1980	Tanah utk bangunan sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
37	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	9.592,00	1980	Bangunan Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
38	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.700,00	1980	Tnh Bgmn Diklat (Sekolah) SDN 70	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
39	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.638,00	1980	Tanah Bangunan Gedung SDN 08 KOTA BIMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
40	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.500,00	1982	Tanah Bangunan Gedung Kantor DPRD Kota Bima	SEKRETARIAT DPRD
41	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.500,00	1982	Kantor BPP Rasana'e Barat	DINAS PERTANIAN
42	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.500,00	1983	Tanah Bangunan Puskesmas	DINAS KESEHATAN
43	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	4.063,00	1983	Tanah bangun diklat (sekolah)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
44	Tanah bangunan pendidikan dan latihan (Sekolah)	1.880,00	1984	Sebidang Tanah Pertanian SDN 73	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
45	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	266,00	1985	Bangunan Pustu Kumbe	DINAS KESEHATAN
46	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	794,00	1985	Tnh Bgmn PKM/posyandu	DINAS KESEHATAN
47	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	14.000,00	1985	Eks Kantor Dinas PU Kab. Bima di Raba	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
48	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	900,00	1986	Bangunan Pustu Kolo	DINAS KESEHATAN
49	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	127,65	1987	TANAH BANGUNAN KANTOR KELURAHAN SAMBINA'E	KECAMATAN MPUNDA
50	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	360,00	1988	Bangunan POSKEDES Jatibaru	DINAS KESEHATAN

Keseluruhan Lahan Milik Pemerintah Kota Bima s.d Tahun 2018

No. Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Penggunaan	SKPD
1	2	5	6	11	SKPD PENGGUNA
1	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	3.195,00	1950	Lokasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	17,16	1951	Lokasi Sekolah Dari Thn 1951 s/d Sekarang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.038,00	1959	Tanah utk bangunan sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	175,00	1962	Lap.Olahraga/halaman	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.080,00	1962	Gedung Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.293,00	1963	Tanah Kantor Kec. RasanaE Barat	KECAMATAN RASANA E BARAT
7	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	6.048,00	1965	Tanah untuk Bgn Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	632,50	1966	Bangunan Pustu Paruga	DINAS KESEHATAN
9	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.027,00	1967	Gedung sekolah dan halamannya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	300,00	1971	Tnh Bgmn Kantor Pemerintah	KECAMATAN RABA
11	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.000,00	1972	Tanah Bangunan Gedung Sekolah SDN 40 Lewirato	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
12	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	32,00	1972	Bangunan sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
13	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	527,00	1973	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KECAMATAN RABA
14	Tanah Bangunan Terminal Darat	3.300,00	1973	Tanah Terminal bangunan Terminal Dara	DINAS PERHUBUNGAN
15	Tanah Bangunan Terminal Darat	2.700,00	1973	Tanah Terminal Kumbe	DINAS PERHUBUNGAN
16	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.715,00	1974	Tnh Bgmn Gedung SDN 41	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
17	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	200,00	1975	Tnh Bgmn Kantor Pemerintah	KECAMATAN RABA
18	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	9.350,00	1975	Tanah bangunan Sekolah SDN 18 Kelurahan Dodu	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
19	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.950,00	1975	Tnh Bgmn Diklat (Sekolah)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
20	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.681,00	1975	Tnh Bgmn Diklat (Sekolah)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
21	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	4.770,00	1976	Tanah Bangunan sekolah/Perumahan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
22	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	4.800,00	1976	Tnh Bgmn Diklat (Sekolah)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
23	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	2.100,00	1977	Tanah puskesmas Mpunda	DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERPRAJA KOTA BIMA



2. Begitupun sasaran strategis yang ingin diwujudkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, baru bisa dicapai sebesar 119%, tetapi bisa dikategorikan memuaskan.

Bima, Pebruari 2019

**KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA BIMA**



Ir. HAMDAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 195903121990031005

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 311

LECTURE 1

MECHANICS

1.1 Kinematics

1.2 Dynamics

1.3 Energy

1.4 Momentum

1.5 Angular Momentum

1.6 Oscillations

1.7 Relativity

1.8 Quantum Mechanics

1.9 Statistical Mechanics

1.10 Thermodynamics

1.11 Electromagnetism

1.12 Optics

1.13 Modern Physics

BAB IV **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan instrumen akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, instrument ini juga dapat dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja di masa-masa yang akan datang.

Kinerja (Performance) dapat dianalisis melalui dua aspek yaitu proses bekerja dan hasil prestasi kerja, dimana kinerja juga merupakan perpaduan antara motivasi yang terdapat dalam diri seseorang dan kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaan. Pengelolaan kinerja merupakan proses yang dirancang untuk menghubungkan satuan-satuan organisasi sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dan tujuan individu bertemu.

Manajemen kinerja didasarkan pada informasi yang diperoleh dari laporan atau sistem laporan kerja, tujuannya untuk membantu meningkatkan prestasi dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan serta melakukan hal-hal yang akan mengembangkan kekuatan untuk mengatasi kelemahan. Tujuan lainnya juga adalah untuk mengetahui karyawan yang berprestasi dalam menerima tanggung jawab lebih besar, dan untuk memutuskan kenaikan gaji secara seimbang.

Secara garis besar, pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun 2018, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengukuran dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan selama Tahun 2018, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima melaksanakan 12 (Dua Belas) kegiatan strategis. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh gambaran bahwa sebanyak 12 (Dua Belas) kegiatan telah dilaksanakan secara efektif atau 100 %, Atau pelaksanaan keseluruhan kegiatan strategis adalah 85,40 %.

Belanja Modal terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	43.587.000,00	125.034.000,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	53.670.000,00	82.835.000,00
3.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	11.155.000,00	0
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	767.467.054,41,00	9.965.348.500,00
5.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Pengadaan Bangunan Drainase	210.913.000,00	
6.	Belanja Modal Tanah	1.995.584.640,00	
	Jumlah	3.082.376.694,41	10.173.217.500,00

3). Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 1.521.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.493.142.000,00 atau 98,13%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 28.508.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp 2.906.380.000,00 maka realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat tahun 2018 menunjukkan penurunan sebesar 0,13 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	1.493.142.000,00	2.906.380.000,00
	Jumlah	1.493.142.000,00	2.906.380.000,00

4). Belanja Modal

Belanja Modal tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 12.612.267.918,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.082.376.694,41 atau 98,04 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp **10.173.217.500,00** maka realisasi Belanja Modal tahun 2018 menunjukkan penurunan sebesar 1,17%.

Belanja Modal terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	43.587.000,00	125.034.000,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	53.670.000,00	82.835.000,00
3.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	11.155.000,00	0
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	767.467.054,41,00	9.965.348.500,00
5.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Pengadaan Bangunan Drainase	210.913.000,00	
6.	Belanja Modal Tanah	1.995.584.640,00	
	Jumlah	3.082.376.694,41	10.173.217.500,00

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
	Kendaraan Bermotor		
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.599.500,00	50.597.000,00
6.	Belanja Makanan dan Minuman	77.265.000,00	46.710.000,00
7.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0
8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	14.350.000,00	14.250.000,00
9.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	0	0
10.	Belanja Perjalanan Dinas	506.715.450,00	720.882.584,00
11.	Belanja Pemeliharaan	56.198.000,00	46.482.500,00
12.	Belanja Jasa Konsultasi	202.051.000,00	332.901.000,00
13.	Belanja Sosialisasi	1.000.000,-	
14.	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ketiga	1.493.142.000,00	2.907.350.000,00
	Jumlah	7.220.740.330,00	4.700.790.340,00

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
3.	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	0	0
II.	Belanja Pegawai - Langsung	1.096.566.000,00	1.002.235.000,00
1.	Honorarium PNS	1.038.216.000,00	1.225.120.000,00
2.	Honorarium Non PNS	58.350.000,00	12.300.000,00
3.	Uang Lembur	0	0
	Jumlah (I+II)	2.949.182.147,00	3.059.808.655,00

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 5.095.899.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.701.717.840,00 atau 92,26 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 39.418.116,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp 1.197.354.306,00 maka realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2016 menunjukkan penurunan sebesar Rp 13.543.370,00 atau 89,83 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	98.583.300,00	97.598.250,00
3.	Belanja Jasa Kantor	517.704.036,00	672.160.000,00
4.	Belanja Perawatan	45.189.350,00	58.601.400,00

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1.	Belanja Pegawai	3.169.168.499,6	2.949.182.147,00	1.782.327.545,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.804.788.082,00	1.548.655.636,00	1.701.717.840,00
3.	Belanja Bantuan Sosial	1.521.650.000,00	1.493.142.000,00	2.906.380.000,00
Jumlah		6.380.406.581,60	5.990.979.783,-	6.390.642.885,00

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 3.169.168.499,6,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.949.182.147,00 atau 93,06%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 219.986.352,6. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 1.782.327.545,00 maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2018 menunjukkan penurunan sebesar 3,11 % dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
I.	Belanja Pegawai - Tak Langsung	1.852.616.147,-	1.822.388.655,3
1.	Gaji dan Tunjangan	1.659.264.647,00.	1.567.826.155,30
2.	Tambahan Penghasilan PNS	193.351.500,00	254.562.500,00

Rp 9.073.356.477,41 atau 47,77 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 9.919.318.022,20

Belanja tahun 2018 terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1.	Belanja Operasi	6.380.406.581,60	5.990.979.783,-	6.390.425.385,00
2.	Belanja Modal	12.612.267.918,-	3.082.376.694,41	10.173.217.500,00
	Jumlah	18.992.674.499,60,	9.073.356.477,41,	16.563.642.885,

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 18.992.674.499,60 dan terealisasi sebesar Rp 9.073.356.477,41 atau 47,77 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 9.919.318.022,20. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 16.563.642.885,- maka realisasi Belanja Operasi tahun 2018 menunjukkan penurunan sebesar lebih kurang 40 %.

Belanja Operasi tahun 2018 terdiri dari :

3.3.1. Realisasi Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan

3.3.3. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Dinas

1. Pendapatan

Untuk tahun 2018 tidak ada Pendapatan karena berdasarkan Perda Tupoksi yang baru Pengurusan IMB dipindahkan ke Dinas PUPR. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya

2.) Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima meliputi Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang. Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Peralatan dan Mesin, dan Belanja aset Tetap Lainnya. Selain itu juga terdapat Belanja Tak Terduga.

Secara umum Belanja tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 18.992.674.499,60 dan terealisasi sebesar

No	Program	Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	64.920.000,-	58.601.400,-	90,26
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	14.250.000,-	14.250.000,-	100
4.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan pelaporan kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	33.985.000,-	33.985.000,-	100,00
		Penyusunan pelaporan keuangan semester	23.112.000,-	22.700.000,-	98,22
		Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran	20.773.000,-	20.773.000,-	100,00
		Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	20.572.000,-	20.572.000,-	100,00
		Penyusunan rencana kerja tahunan RKA/DPA/SKPD	45.772.000,-	45.772.000,-	100,00
		Penyusunan LKIP, LPJ, LPPD dan Renja SKPD	33.461.000,-	33.461.000,-	100,00

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD 2017

No	Program	Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (rekening)	47.580.000,-	43.073.550,-	90,52
		Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola administrasi keuangan)	92.400.000,-	92.300.000,-	99,89
		Penyediaan jasa kebersihan kantor (Jasa Klingservis)	39.000.000,-	39.000.000,-	100
		Penyediaan alat tulis kantor	48.282.300,-	48.270.350,-	99,98
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.150.000,-	30.150.000,-	100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.941.000,-	101.336.000,-	93,88
		Penyediaan makanan dan minuman	18.000.000,-	18.000.000,-	100
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	351.668.600,-	351.668.025,-	99,99
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	19.904.200,-	18.165.000,-	91,26
2.	Peningkatan sarana dan prasarana	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	23.000.000,-	22.880.000,-	99,47

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan Utama	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Pemerintah sesuai kebutuhan sesuai administrasi yang lengkap	Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			
		Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	115.640.000,-	99.190.309,-	85,78
Jumlah			18.992.674.499,60,-	9.073.356.477,41-	47,77%

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama tahun anggaran 2018, pagu anggaran pelaksanaan program/kegiatan utama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima adalah sebesar **Rp. 18.992.674.499,60-** dan terealisasi sebesar **Rp. 9.073.356.477,41,-** atau sebesar **85,40%**.

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima juga menyelenggarakan program dan kegiatan rutin sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun 2018

No	Program	Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.000.000,-	39.000.000,-	100

2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Selama tahun anggaran 2018, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima melaksanakan 7 (tujuh) program utama dan 12 (dua belas) kegiatan utama. Adapun hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21
Realisasi anggaran program/kegiatan utama yang mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan Utama	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Meningkatnya rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan	3.880.410.000,-	3.830.885.606,-	98,72
2.		Lingkungan Sehat Perumahan	69.275.800,-	69.225.800,-	99,93
3.		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	91.719.400,-	85.039.000,-	92,72
4.		Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	664.900.000,-	655.179.000,-	98,54
		Program Perencanaan Permukiman Kumuh	274.002.700,-	257.129.500,-	93,84
		Program Pengembangan Kawasan	250.865.000,-	247.434.000,-	98,63
	Meningkatnya Penyediaan Lahan	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,	12.282.105.220,-	9.796.114.800,-	79,76

sebesar Rp 5.990.979.783,- atau 93,90% dari anggarannya sebesar Rp 6.380.406.581,60. Realisasi belanja modal sebesar Rp. 3.082.376.694,41 atau 24,44% dari anggarannya sebesar Rp. 12.612.267.918,-

Sedangkan tahun anggaran 2017 realisasi adalah sebagai berikut :

Realisasi pendapatan diperoleh melalui APBD Tahun 2018 sebesar Rp 0,- (nol). Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 17.876.885,00,- atau 87,10 % dari anggarannya sebesar Rp 20.525.077.875,00.

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 10.173.217,500.00,- atau 82,29% dari anggarannya sebesar Rp 12.362.220,00.

(Realisasi Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan) terlampir.

Tabel 3.20
Rekapitulasi Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima
Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi
1.	Belanja Operasi	6.380.406.581,60	5.990.979.783,-	93,90%
2.	Belanja Modal	12.612.267.918,-	3.082.376.694,41	24,44%
	Jumlah	18.992.674.499,60,	9.073.356.477,41,	47,77%

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun 2018

1. Rencana Teknis Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen/2 Eks	1 Dokumen/2 Eks	100%
Program Pengembangan Kawasan				
1. Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman Baru	1 Dokumen/2 Eks	1 Dokumen/2 Eks	100%
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				
1. Pembebasan/ Pengadaan Tanah	Luas Tanah yang diadakan/dibebaskan	11,1 Ha	2,97 Ha	26,76%
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan				
1. Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Porsentase konflik pertanahan yang ditangani	100%	100%	100%

3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1. Target dan Realisasi Belanja

1. Target dan Realisasi Belanja

Secara keseluruhan kinerja keuangan Dinas Perumahan Kota Bima Tahun 2018 menunjukkan perbandingan dengan tahun anggaran sebelumnya.

Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 7.220.740.330,41 atau 41,97 % dari anggarannya sebesar Rp 17.203.371.000. Realisasi Belanja operasional

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (Eselon II dan IV)

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Program Pengembangan Perumahan				
2. Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Jumlah Rumah yang dibangun baru dan diperbaiki (peningkatan kualitas)	475 unit	419 unit	88,21%
3. Pendataan Perumahan	Jumlah Dokumen Data perumahan yang terupdate	1 Dokume/1 Eksamplar	1 Dokumen/1 Eksamplar	100%
4. Pembangunan dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DAK)	Jumlah Rumah yang dibangun baru dan diperbaiki (peningkatan kualitas) dikawasan permukiman kumuh	241 unit	241 unit	100%
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rusunawa	Pembangunan Pagar, Pembangunan Taman dan Pembangunan drainase lingkungan rusunawa	3 Paket	3 Paket	100%
6. Pengelolaan Rusunawa	Jumlah Penghuni Rusunawa	130 Unit	92 unit	70,77%
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial				
1. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya	Jumlah Rumah yang dibangun baru dan diperbaiki (peningkatan kualitas) dan akibat bencana alam/sosial	100 unit	105 unit + 3 unit bantuan Stimulan Pelindo = 108 unit	108%
2. Pendampingan pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni	Jumlah laporan rumah tidak layak huni yang dibangun baru dan peningkatan kualitas di kawasan permukiman kumuh	241 Laporan	241 laporan	100%
Program Perencanaan Permukiman Kumuh				

Tabel 3.18

Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis III	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis III	Jumlah Anggaran (Rp)
Meningkatnya penyediaan lahan pemerintah sesuai kebutuhan dengan administrasi yang lengkap	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	12.050.840.000,-
	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	102.540.000,-

Sumber: Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Kota Bima 2018

Pengukuran kinerja tersebut diatas merupakan bagian dari proses penilaian akuntabilitas jangka menengah maupun tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima. Hal ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja tahun berkenaan terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima sehingga tergambar capaian target jangka menengah sampai tahun 2018.

Keberhasilan kinerja tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung sehingga kegiatan tersebut berjalan cukup efektif, antara lain :

1. Tersedianya sumberdaya pegawai yang cukup dan memadai;
2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung; dan
3. Tersedianya anggaran yang cukup.

Adapun target kinerja dan realisasi untuk pengukuran kinerja sasaran strategis III tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis II Tahun 2018

Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya penyediaan lahan pemerintah sesuai kebutuhan dengan administrasi yang lengkap	Persentase Aset Tanah Pemerintah yang bersertifikat	16%	17,49%	109,3%
	Persentase Tanah Milik Pemerintah yang tidak memiliki Konflik	100%	100%	100%

Sumber: Hasil Analisa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2018

Capaian kinerja pada indikator kinerja persentase aset tanah pemerintah yang bersertifikat adalah 17,49%. Untuk pembebasan tanah ditargetkan 11,1 Ha, yang terealisasi 2,97 Ha, yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana. Untuk Penerbitan sertifikat sudah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Kota Bima dan masih dalam proses. Kendala tidak terpenuhinya target pengadaan tanah disebabkan karena prosesnya panjang, mesti dinilai oleh pihak konsultan penilai harga tanah (Apraisal), proses nego, pencarian lokasi tanah.

Capaian Kinerja pada indikator kinerja persentase tanah milik pemerintah yang tidak memiliki konflik adalah 100%, karena tidak konflik yang berarti yang dihadapi.

Tabel 3.18

Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis III	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis III	Jumlah Anggaran (Rp)
Meningkatnya penyediaan lahan pemerintah sesuai kebutuhan dengan administrasi yang lengkap	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	12.050.840.000,-
	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	102.540.000,-

Sumber: Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Kota Bima 2018

Pengukuran kinerja tersebut diatas merupakan bagian dari proses penilaian akuntabilitas jangka menengah maupun tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima. Hal ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja tahun berkenaan terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima sehingga tergambar capaian target jangka menengah sampai tahun 2018.

Keberhasilan kinerja tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung sehingga kegiatan tersebut berjalan cukup efektif, antara lain :

1. Tersedianya sumberdaya pegawai yang cukup dan memadai;
2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung; dan
3. Tersedianya anggaran yang cukup.

Adapun target kinerja dan realisasi untuk pengukuran kinerja sasaran strategis III tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis II Tahun 2018

Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya penyediaan lahan pemerintah sesuai kebutuhan dengan administrasi yang lengkap	Persentase Aset Tanah Pemerintah yang bersertifikat	16%	17,49%	109,3%
	Porsentase Tanah Milik Pemerintah yang tidak memiliki Konflik	100%	100%	100%

Sumber: Hasil Analisa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2018

Capaian kinerja pada indikator kinerja persentase aset tanah pemerintah yang bersertifikat adalah 17,49%. Untuk pembebasan tanah ditargetkan 11,1 Ha, yang terealisasi 2,97 Ha, yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana. Untuk Penerbitan sertifikat sudah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Kota Bima dan masih dalam proses. Kendala tidak terpenuhinya target pengadaan tanah disebabkan karena prosesnya panjang, mesti dinilai oleh pihak konsultan penilai harga tanah (Apraisal), proses nego, pencarian lokasi tanah.

Capaian Kinerja padan indikator kinerja persentase tanah milik pemerintah yang tidak memiliki konflik adalah 100%, karena tidak konflik yang berarti yang dihadapi.

Tabel 3.13
Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis II	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis II	Jumlah Anggaran (Rp)
	Program Pengembangan Perumahan	1.821.567.918,-
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Program Perencanaan Permukiman Kumuh	65.500.000,-

Sumber: Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2018

Pencapaian Sasaran Strategis III
Meningkatnya Penyediaan Lahan Pemerintah sesuai Kebutuhan dengan Administrasi yang lengkap

Meningkatnya penyediaan lahan pemerintah sesuai kebutuhan dengan administrasi yang lengkap adalah PR besar bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima. Hal ini didasari oleh banyaknya asset pemerintah yang belum diterbitkan sertifikat. Hal ini dibutuhkan kerja keras dan kerjasama dari pihak-pihak terkait.

Berikut data asset tanah pemerintah yang bersertifikat dan keseluruhan asset tanah pemerintah

Tabel 3.14
Luas Lahan dan Luas Lahan Bersertifikat Milik Pemerintah Kota Bima Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Luas Lahan Bersertifikat (m ²)	136.847	173.374	173.374	173.374	197.286	197.286
2	Luas Lahan Keseluruhan (m ²)	936.006,53	950.932,53	1.014.544,23	1.134.872,273	1.207.599.273	1.127.875,23
3	Porsentase (%)	14,62	18,23	17,09	15,28	16,34	17,49

tahun 2018 belum memenuhi target Renstra 2018 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal ini disebabkan oleh bencana banjir bandang pada Desember 2016, sehingga menambah tingkat kekumuhan di Kota Bima.

Adapun perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2013-2018 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.14
Realisasi Kinerja Pencapaian sasaran Strategis II terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka Menengah 2018	Realisasi Sampai Tahun 2018	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Porsentase Luas Kawasan Kumuh	20%	26,25%	76,19%

Sumber: Hasil Analisa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima 2018

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis II tersebut, selama tahun 2018, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima telah melaksanakan sejumlah program/kegiatan yang dijabarkan ke dalam program/kegiatan pokok sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

	r. Kel. Nitu	7,11	0		7,11
	s. Kel. Rite	8,13	2,37		5,76
	t. Kel. Penanae	6,24	1,05		5,19
	u. Kel. Kendo	8,76	0		8,76
	v. Kel. Ntobo	13,06	1,43		11,63
5.	Kec. RasanaE Timur	91,8	2,3	2,51	89,51
	h. Kel. Lelamase	11,74	0		11,74
	i. Kel. Nungga	11,99	0		11,99
	j. Kel. Dodu	9,31	0		9,31
	k. Kel. Oi Fo'o	22,6	0		22,6
	l. Kel. Kumbe	23,25	2,3		20,96
	m. Kel. Kodo	6,3	0		6,3
	n. Kel. Lampe	6,61	0		6,61
	Jumlah Total Kumuh	310,56	81,52	26,25%	229,04

Sumber : SK Kumuh Nomor 524 Tahun 2018

Kemudian apabila dibandingkan dengan tahun 2017 maka terdapat penurunan kinerja sebesar 23,81% sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pencapaian Sasaran Strategis II

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Porsentase Luas Kawasan Kumuh	20,46%	20,46%	100%.	20%	26,25%	76,19%.
Persentase						-23,81%

Sumber : Hasil Analisis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2018

Kemudian capaian kinerja tahun 2018 jika di bandingkan dengan target Renstra tahun 2013-2018 maka kinerja Porsentase Luas Kawasan Kumuh di

TABEL 3.12
REKAPAN PERMUKIMAN KUMUH

No	Wilayah	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Luas Kawasan Kumuh yang tertangani (Ha)	Porsentase (%)	Sisa Luas Permukiman Kumuh (Ha)
1.	Kec. Asakota	48,59	7,82	16,09	40,77
	e. Kel. Kolo	3,96	0		3,96
	f. Kel. Jatiwangi	18,81	0		18,81
	g. Kel. Jatibaru	16,58	0		16,58
	h. Kel. Melayu	9,24	7,82		1,42
2.	Kec. RasanaE Barat	63,16	38,48	60,92	24,68
	a. Kel. Paruga	9,01	9,01		0
	b. Kel. Tanjung	14,91	5,99		8,92
	c. Kel. Sarae	7,73	7,21		0,52
	d. Kel. Dara	21,39	6,15		15,24
	e. Kel. Nae	10,12	10,12		0
3.	Kec. Mpunda	35,86	12,22	34,68	23,64
	k. Kel. Manggemaci	7,56	5,62		1,94
	l. Kel. Monggonao	2,13	0,65		1,48
	m. Kel. Santi	2,12	0,83		1,29
	n. Kel. Sambinae	4,58	2,81		1,77
	o. Kel. Penatoi	6,83	0		6,83
	p. Kel. Mande	5,51	0,62		4,89
	q. Kel. Sadia	3,23	1,69		1,54
	r. Kel. Matakando	1,5	0		1,5
	s. Kel. Panggi	2,4	0		2,4
4.	Kec. Raba	71,15	20,7	29,09	50,45
	l. Kel. Penaraga	8,49	8,49		0
	m. Kel. Rontu	3,17	0,05		3,12
	n. Kel. Rabangodu Utara	5,81	5,81		0
	o. Kel. Rabadompu Barat	1,78	1,5		0,28
	p. Ke. Rabadompu Timur	3,7	0		3,7
	q. Kel. Rabangodu Selatan	4,9	0		4,9

Pencapaian Sasaran Strategis II

Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman

Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman mengandung makna bagaimana mengurangi permukiman kumuh di wilayah Kota Bima. Untuk mengurangi kekumuhan tersebut maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui anggaran DAK memberikan bantuan pelayanan terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk mendapatkan bantuan pembangunan dan perbaikan perumahan yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni baik di kawasan permukiman kumuh. Dan merencanakan penanganan kawasan permukiman kumuh.

Hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis II disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.11
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis I Tahun 2018

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Porsentase Luas Kawasan Kumuh	20%	26,25%	76,19%

Sumber : Hasil Analisis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja porsentase Luas Kawasan Kumuh mencapai 76,19%. Untuk lebih jelasnya Luas kawasan kumuh dan luas kawasan kumuh dapat dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Realisasi Kinerja Pencapaian sasaran Strategis I terhadap Target
Jangka Menengah

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka Menengah 2018	Realisasi Sampai Tahun 2018	% Capaian
Meningkatnya Rumah Layak Huni	Porsentase rumah layak huni	90%	90,18	100,2%.

Sumber: Hasil Analisa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima 2018

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis I tersebut, selama tahun 2018, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima telah melaksanakan sejumlah program/kegiatan yang dijabarkan ke dalam 1 (satu) kegiatan pokok sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.10
Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I	Jumlah Anggaran (Rp)
Meingkatkan Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan	1.821.567.918,-
	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	1.965.050.000,-
	Program Pengembangan Kawasan	295.740.000,-

Sumber: Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2018

			4.531		
	3	Asakota	6.932	unit	
	4	Raba	9.083	Unit	
	5	Mpunda	7.226	Unit	

Kemudian apabila dibandingkan dengan tahun 2017 maka terdapat peningkatan kinerja sebesar 12,17% sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pencapaian Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Porsentase rumah layak huni	89%	91,30%	102,59%	90%	90,18%	100,2%.
Persentase						0,39%

Sumber : Hasil Analisis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2018

Kemudian capaian kinerja tahun 2018 jika di bandingkan dengan target Renstra tahun 2013-2018 maka kinerja Porsentase rumah layak huni di tahun 2018 sudah memenuhi target Renstra 2018 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 100%.

Adapun perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2013-2018 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.7

Penanganan Sektor Perumahan Tahun 2018

TABEL 3.7
Data Rumah Layak Huni

JUMLAH RUMAH BERDASARKAN KONDISI					
NO.	Nama		Nilai	Satuan	Sumber Data
1	Jumlah Rumah Layak Huni		31.409	Unit	DPKP
	1	RasanaE Barat	6.502	Unit	
	2	RasanaE Timur	4.012	Unit	
	3	Asakota	6.285	Unit	
	4	Raba	8.142	Unit	
	5	Mpunda	6.468	Unit	
2	Jumlah Tidak Layak Huni		3.419	Unit	DPKP
	1	RasanaE Barat	554	Unit	
	2	RasanaE Timur	519	Unit	
	3	Asakota	647	Unit	
	4	Raba	941	Unit	
	5	Mpunda	758	Unit	
3	Jumlah Rumah		34.828	Unit	DPKP
	1	RasanaE Barat	7.056	unit	
	2	RasanaE Timur		unit	

Pencapaian Sasaran Strategis I :
Meningkatnya Rumah Layak Huni

Meningkatnya Layak Huni mengandung makna adanya bantuan pelayanan terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk mendapatkan bantuan pembangunan dan perbaikan perumahan yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni baik di kawasan permukiman kumuh (bantuan dana dari DAK), maupun kawasan tidak kumuh (BSPS) (Anggaran APBD I).

Hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis I disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis I Tahun 2018

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase rumah layak huni	90%	90,18%	100,2%

Sumber : Hasil Analisis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja persentase rumah tidak layak huni yang ditangani mencapai lebih dari 100%.

Tabel 3.3

Total Luas Lahan Pemerintah dan Luas Lahan Pemerintah yang bersertifikat

No.	Total Luas Lahan Pemerintah (M ²)	Luas Lahan Pemerintah bersertifikat (M ²)	Porsentase (%)	
1.	1.127.875,23	197.286	17,49	

Pencapaian Sasaran Strategis I :
Meningkatnya Rumah Layak Huni

Meningkatnya Layak Huni mengandung makna adanya bantuan pelayanan terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk mendapatkan bantuan pembangunan dan perbaikan perumahan yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni baik di kawasan permukiman kumuh (bantuan dana dari DAK), maupun kawasan tidak kumuh (BSPS) (Anggaran APBD I).

Hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis I disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.4

Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis I Tahun 2018

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase rumah layak huni	90%	90,18%	100,2%

Sumber : Hasil Analisis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja porsentase rumah tidak layak huni yang ditangani mencapai lebih dari 100%.

	Utara				
	d. Kel. Rabadompu Barat	40,80	0,28		
	e. Ke. Rabadompu Timur	20,35	3,7		
	f. Kel. Rabangodu Selatan	37,98	4,9		
	g. Kel. Nitu	9,98	7,11		
	h. Kel. Rite	19,69	5,76		
	i. Kel. Penanae	22,96	5,19		
	j. Kel. Kendo	12,55	8,76		
	k. Kel. Ntobo	21,37	11,63		
5.	Kec. RasanaE Timur	192,14	89,51	102,63	53,41
	a. Kel. Lelamase	11,49	11,74		
	b. Kel. Nungga	24,53	11,99		
	c. Kel. Dodu	21,84	9,31		
	d. Kel. Oi Fo'o	30,10	22,6		
	e. Kel. Kumbe	70,45	20,96		
	f. Kel. Kodo	19,51	6,3		
	g. Kel. Lampe	14,22	6,61		
	Jumlah Total Kawasan Permukiman	1.816,07	229,04	1.587,03	87,39

Sumber : Hasil Pemuktahiran Baseline Data Kota Bima 2018 (Kotaku 2018)

2. Untuk tujuan kedua Meningkatkan Penanganan Pertanahan dengan indikator Porsentase Tanah Pemerintah yang tersedia sesuai kebutuhan dan bersertifikat dapat disajikan data-data pada tabel sebagai berikut.

1. Untuk Tujuan Pertama Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dengan indikator Porsentase kawasan permukiman layak huni dapat disajikan dengan data-data sebagai berikut :

TABEL 3.2
REKAPAN LUAS KAWASAN PERMUKIMAN

No	Wilayah	Luas Kawasan Permukiman (Ha)	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Ha)	Luas Kawasan Permukiman Layak Huni (Ha)	Porsentase (%)
1.	Kec. Asakota	163,70	40,77	122,93	75,09
	a. Kel. Kolo	1,65	3,96		
	b. Kel. Jatiwangi	77,61	18,81		
	c. Kel. Jatibaru	49,61	16,58		
	d. Kel. Melayu	34,83	1,42		
2.	Kec. RasanaE Barat	834,13	24,68	809,45	97,04
	a. Kel. Paruga	38,37	0		
	b. Kel. Tanjung	662,93	8,92		
	c. Kel. Sarae	39,20	0,52		
	d. Kel. Dara	47,79	15,24		
	e. Kel. NaE	30,78	0		
	f. Kel. Pane	15,06	0		
3.	Kec. Mpunda	344,04	23,64	320,4	93,12
	a. Kel. Manggemaci	26,26	1,94		
	b. Kel. Monggonao	35,79	1,48		
	c. Kel. Santi	28,58	1,29		
	d. Kel. Sambinae	18,70	1,77		
	e. Kel. Penatoi	95,98	6,83		
	f. Kel. Mande	30,99	4,89		
	g. Kel. Sadia	25,46	1,54		
	h. Kel. Sadia	26,60	1,5		
	i. Kel. Matakando	18,83	2,4		
	j. Kel. Panggi	36,84			
	k. Kel. Lewirato				
4.	Kec. Raba	282,07	50,45	231,62	82,11
	a. Kel. Penaraga	26,34	0		
	b. Kel. Rontu	18,55	3,12		
	c. Kel. Rabangodu	51,51	0		

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Pengukuran kinerja tersebut membandingkan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya serta membandingkan dengan target renstra dan standar nasional. Pembahasan berikut menunjukkan pencapaian sasaran strategis dan indikator-indikator kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja

Pencapaian Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima

Tabel 3.1

Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Porsentase kawasan permukiman layak huni	100%	87,39%	87,39%
Meningkatkan Penanganan Pertanahan	Porsentase Tanah Pemerintah yang tersedia sesuai kebutuhan dan bersertifikat	16%	17,49%	109,3%

Adapun realisasi pencapaian tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dijelaskan dengan data-data sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	90%
2.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh	20%
3.	Meningkatnya Penyediaan Lahan Pemerintah sesuai kebutuhan dengan administrasi yang lengkap	Persentase Asset Tanah Pemerintah yang bersertifikat	16%
4.		Persentase Tanah Milik Pemerintah yang tidak memiliki konflik	100%

Program	Anggaran	Ket.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 588.216.082.000,-	APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 103.200.000,-	APBD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 14.350.000,-	APBD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 196.367.000,-	APBD
Pengembangan Perumahan	Rp. 1.821.567.918,-	APBD/DAK
Perencanaan Permukiman Kumuh	Rp. 65.500.000,-	APBD
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp. 12.050.840.000,-	APBD
Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Rp. 102.540.000,-	APBD
Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Rp. 1.965.050.000,-	APBD
Pengembangan Kawasan	Rp. 295.740.000,-	APBD

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kota Bima, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
- d. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima pada awal tahun 2018 terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja utama dengan anggaran sebesar pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 10 (sepuluh) program dengan total anggaran sebesar Rp. 12.953.371.000,- (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun 2013-2018 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018.

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Ruma Layak Huni	90%
2.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	20%
3.	Meningkatnya penyediaan Lahan Pemerintah sesuai kebutuhan dengan administrasi yang lengkap	Porsentase penerbitan sertifikat tanah asset tanah pemerintah yang dibebaskan/diadakan	16%
		Porsentase penyelesaian Konflik/Permasalahan Pertanahan	100%

2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tabel 2.2
Penjelasan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
1.	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Tertangani}}{\text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Keseluruhan}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani}}{\text{Luas Kawasan Permukiman Kumuh secara keseluruhan}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya Penyediaan Lahan Pemerintah sesuai kebutuhan dengan administrasi yang lengkap	Porsentase Asset Tanah Pemerintah yang bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah Asset tanah Pemerintah Kota yang berserti fikat}}{\text{Total Asset tanah milik Pemerintah Kota yang dibebaskan}} \times 100\%$
		Porsentase Tanah Milik Pemerintah yang tidak memiliki konflik	$\frac{\text{Jumlah Konflik pertanahan yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Konflik Tanah Keseluruhan}} \times 100\%$

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima tahun 2018 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan

Kepentingan Umum	Porsentase Tanah Milik Pemerintah yang tidak memiliki konflik				100%	100%
------------------	---	--	--	--	------	------

2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Latar Belakang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) tahun 2018 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun 2013-2018. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima.

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun 2018 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Visi tersebut merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima sebagai suatu lembaga keamanan dan ketertiban daerah. Selanjutnya visi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam 2 (dua) uraian misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran strategis.

rumusan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman
2. Meningkatkan penanganan pertanahan pemerintah untuk kepentingan umum

Visi dan misi yang sudah dirumuskan perlu dilengkapi dengan tujuan, sasaran serta indikator kinerja untuk memudahkan langkah pelaksanaannya maupun pengukuran hasil atau tingkat capaian dari visi dan misi tersebut.

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol. PP Kota Bima beserta indikator kinerja setiap tahunnya disajikan sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	86%	87%	88%	89%	90%
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Porsentase Luas Kawasan Kumuh				20,46%	20%
Meningkatnya penanganan asset tanah Pemerintah untuk	Porsentase Aset Tanah Pemerintah yang bersertifikat				15%	16%

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Latar Belakang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima sebagai coordinator penyediaan perumahan swadaya dan penyediaan lahan dituntut untuk selalu tanggap dan responsive terhadap dinamika serta perubahan-perubahan yang terjadi baik secara internal wilayah maupun secara eksternal. Disamping itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga dituntut untuk mampu menerapkan berbagai pendekatan peraturan dan penegakan perda dalam konteks dan waktu yang tepat untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan kebutuhan berbagai kelompok atau pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai perangkat daerah di Kota Bima.

Berkaitan dengan hal tersebut telah merumuskan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai sebagai bagian dari perwujudan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima telah merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran sampai tahun 2018 sebagaimana yang telah tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima 2018-2023. Adapun visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan”

b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	4	18,18%
2.	Golongan III	20	90,91%
3.	Golongan II	2	9,09%
4.	Golongan I	1	4,55%
	Total	27	100,00%

c. Jumlah pegawai berdasarkan eselonering

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Eselon II	1	4,55%
2.	Eselon III	3	11,11%
3.	Eselon IV	8	29,63%
4.	Non-Eselonering	15	68,18%
	Total	27	100,00%

- pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya
- fasilitasi persyaratan pemberian izin lokasi dan peninjauan lokasi tanah serta permohonan izin membuka tanah, fasilitas penunjukan lahan dan pengembangan, pemeriksaan lapangan berdasarkan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW), pengusulan Camat sebagai PPAT sementara dan pembinaan administrasi pertanahan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Unit Pelaksana Teknis

- UPT adalah Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis dinas.

Adapun Struktur Organisasi terlampir

a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	S3	-	-
2.	S2	1	3,70%
3.	S1	22	81,48%
4.	Diploma 3	-	-
5.	SMA / sederajat	3	11,11%
6.	SD	1	4,55%
	Total	27	100,00%

- pengelolaan dan pemanfaatan kawasan khusus, strategis dan skala besar, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang Pertanahan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pertanahan mempunyai fungsi

- penyusunan rencana dan program dan kegiatan di bidang Pertanahan
- penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis
- pelaksanaan anggaran kegiatan
- fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum retribusi tanah, ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum, inventarisasi tanah bangunan dan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pebantuan, fasilitasi mitigasi/pencegahan bencana dan pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum dan linmas serta penegakan HAM

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi
 - penyusunan rencana dan program dan kegiatan di bidang Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman, strategi dan skala besar
 - fasilitasi penyelenggaraan pembangunan serta kerjasama swasta dan/atau masyarakat dalam pembangunan kasiba/lisiba
 - pengendalian kawasan permukiman
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang pengendalian dan pengembangan kawasan permukiman
 - pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kasiba dan lisiba
 - pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penataan kawasan Permukiman Kumuh mempunyai fungsi
- penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang Penataan Kawasan Permukiman Kumuh
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategi penataan kawasan permukiman kumuh
 - penyusunan kebijakan di bidang penataan kawasan permukiman kumuh
 - pelaksanaan perencanaan program dan anggaran di bidang penataan kawasan permukiman kumuh
 - pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan penataan kawasan permukiman kumuh
 - pelaksanaan kebijakan di bidang penataan kawasan permukiman kumuh
 - penyusunan kebijakan dan strategis serta NSPK kasiba/lisiba
 - penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh
 - rekomendasi dalam perizinan kasiba/lisiba
 - pelayanan informasi penyelenggaraan penataan kawasan permukiman kumuh

- Perumusan dan penyusunan rencana strategis bidang
- Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Penyelenggaraan pelaksana tugas di bidang kawasan permukiman dan pertanahan
- Pengoordinasian perencanaan teknis dibidang pengelolaan pengembangan kawasan
- Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang kawasan permukiman dan pertanahan
- Pelaporan dan pelaksanaan tugas pengelolaan kawasan permukiman dan pertanahan
- Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan membawahi :

a. Seksi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh;

Seksi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang penataan kawasan permukiman kumuh

- fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan swadaya
- pelaksanaan kerjasama dengan lembaga keuangan mikro (LKM)/lembaga keuangan mikro non bank (LKNB) dalam mempermudah akses untuk mendapatkan stimulant pembangunan dan perbaikan rumah bagi MBR
- pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pendukung perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
- evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan swadaya, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengoordinasian penyelenggaraan di bidang kawasan permukiman dan pertanahan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- Penetapan rencana strategis bidang sesuai rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi dinas

- penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang perumahan swadaya
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembiayaan perumahan swadaya
- pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan system pembiayaan perumahan swadaya
- penyiapan bahan koordinasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan rumah swadaya
- fasilitasi bantuan pembiayaan, pembangunan dan pemeliharaan perumahan bagi MBR
- fasilitasi pembiayaan dan stimulant pembangunan prasarana dan sarana umum (PSU) perumahan swadaya
- pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
- pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan swadaya
- penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria di bidang pembiayaan rumah swadaya
- penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
- fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah
- fasilitasi pembangunan rumah contoh rumah sehat sederhana (RSH) sebagai stimulant

- fasilitasi dan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi
 - fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Milik (Rusunami) untuk MBR dan rumah khusus beserta prasarana, sarana dan utilitasnya
 - fasilitasi pembangunan perumahan bagi PNS dengan harga terjangkau, rumah untuk korban bencana, perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan
 - pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan perumahan, dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Perumahan Swadaya;

Seksi Perumahan Swadaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang perumahan formal

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perumahan Swadaya mempunyai fungsi

- penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang perumahan formal
- penyiapan bahan koordinasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan perumahan yang dilaksanakan secara terorganisir oleh sebuah institusi formal
- pelaksanaan penyediaan, fasilitasi, pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan formal
- menerbitkan izin pembangunan dan pengembangan perumahan
- penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB)
- penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
- pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan system pembiayaan perumahan formal
- pelaksanaan pencegahan timbulnya perumahan kumuh
- pengawasan dan pengendalian pengelolaan rumah susun dan rumah khusus
- pelaksanaan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan (BUMN, BUMD, Koperasi, perorangan dan swasta)

- perencanaan tata letak bangunan perumahan dengan memperhatikan tata lingkungan
- pemberian pertimbangan untuk menetapkan atau penolakan permohonan rencana perumahan
- penyusunan kebijakan, strategi dan program serta NSPK bidang perumahan
- penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di tingkat penyelenggaraan perumahan
- Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan perumahan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Perumahan Formal;

Seksi Perumahan Formal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang perumahan formal

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perumahan Formal mempunyai fungsi

- penyusunan pedoman dan manual penghunian dan pengelolaan perumahan setempat dengan mengacu pada SPM nasional
- pengumpulan inventarisir data-data di bidang perumahan
- pengelolaan data base bidang perumahan meliputi data rumah layak huni, harga rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga
- pelaksanaan pelayanan informasi bidang perumahan
- penyusunan skala prioritas pembangunan perumahan
- penyusunan standar teknik pembangunan perumahan
- penyusunan pola-pola dan konsep pembangunan dan perumahan yang meliputi aspek social, aspek fisik, ekonomi dan budaya
- pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan fasilitas penyedia rumah umum, rumah khusus dan rumah swadaya bagi MBR
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penyedia perumahan, meneliti dan memproses persyaratan administrasi teknis setiap permohonan rencana pembangunan perumahan rakyat

- pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah susun milik (Rusunami) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- c. Pembinaan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, lembaga keuangan dan lembaga pendukung perumahan dalam pembangunan perumahan formal dan swadaya.
 - d. Pengaturan pelaksanaan penyusunan rencana penataan perumahan
 - e. Pengaturan, penelitian, pembinaan izin dan rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan\
 - f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang Perumahan Rakyat Membawahi :

a. Seksi Perencanaan Perumahan;

Seksi Perencanaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pengorganisasian dan perencanaan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,

Seksi Perencanaan Perumahan mempunyai fungsi

- penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang perencanaan perumahan

- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
- d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- f. Pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- g. Pelaksanaan pengelolaan data dan kerjasama;
- h. Pelaksanaan penyusunan laporan hasil perencanaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasansesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perencanaan, pembangunan dan pembinaan di bidang perumahan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Bidang Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan operasional dan program di bidang perumahan rakyat.
- b. Penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan perumahan formal dan perumahan swadaya, pemeliharaan prasarana dan sarana dan utilitas perumahan dan

- a. Penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - e. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
 - f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - g. Penyusunan laporan kegiatan SubBagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.
- Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencanan kerja, program dan kegiatan;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;

pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat Mempunya Tugas Memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan Badan;
- d. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi berbagai Sub yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman:
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pengorganisasian pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan kajian teknis perijinan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pengorganisasian dengan unsur terkait dalam penyelenggaraan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- g. penyelenggaraan administrasi dibidang perumahan dan kawasan permukiman
- h. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan

Governance atau pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik (good governance) ditandai dengan 3 pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya yaitu : **Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas.**

Ketiga pilar tersebut telah menjadi agenda penting untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan perlunya reformasi, khususnya di Lingkungan Organisasi Pemerintahan. Untuk mendukung efektivitas tujuan tersebut setiap organisasi publik diharapkan dapat menyusun 3 dokumen pokok dalam konsep Perencanaan Strategi, yaitu Rencana Strategi Lima Tahunan (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan laporan Kinerja (LKIP) yang menggambarkan capaian kinerja organisasi. Penjabaran atas rencana Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima khusus untuk tahun 2018 dituangkan dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018.

D. Struktur Organisasi

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Bima nomor 43 tahun 2016, maka susunan organisasinya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.

B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Data Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima adalah unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah yang bertugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tugas pembantuan dan dekosentrasi.
2. Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima adalah :
 - a. Perumusan dan penetapan visi dan misi dan rencana strategis serta program kerja dinas
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - c. Pembinaan dan penyelenggaraan kepegawaian dan jabatan fungsional
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Aspek Strategis

Sebagai Lembaga Pemerintah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima dituntut untuk dapat menyelenggarakan Good

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima berisi informasi tentang capaian kinerja selama tahun 2018, Sehubungan dengan realisasi Rencana Kinerja Tahun 2018. Terdapat 8 (delapan) program sasaran strategis yang harus dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima selama tahun 2018. Sasaran strategis tersebut diwujudkan melalui 12 (dua belas) kegiatan strategis.

Berdasarkan Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Analisis Kinerja yang telah dilakukan terhadap Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima tahun 2018, diperoleh gambaran sebagai berikut :

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima telah berhasil mewujudkan/mencapai 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi dan langkah perbaikan ke depan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, antara lain adalah :

1. Penempatan sumber daya manusia tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki
2. Perencanaan tidak didukung dengan pendanaan yang memadai

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima dapat kami selesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menggambarkan informasi tentang capaian kinerja selama tahun 2018. Menyadari hal itu maka penyusunan senantiasa melibatkan setiap level organisasi/bagian yang ada dan hasilnya telah disosialisasikan kepada masing-masing bagian sebagai penanggung jawab dari kegiatan yang ada maupun unsur organisasi lainnya guna mendapat masukan agar keberhasilan pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dicapai secara maksimal.

Tidak lupa disampaikan ucapan terima kasih Kepada semua pihak yang telah membantu sehingga dapat tersusun dengan baik dan diharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan Penyusunan LKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima di masa mendatang.

Raba-Bima, Pebruari 2019

**KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA BIMA**



Ir. HAMDAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 195903121990031005